

# Buletin Wahana Komunikasi Program MFPII

## MFP mendukung dan Memfasilitasi Pengembangan Rancang Bangun Papua era Otonomi Khusus



Dr. Agus Setyarso dari DKN, memberikan ceramah pada workshop di Jayapura.

### Workshop Pembangunan KPH Papua

Keterlibatan MFP dalam workshop pembangunan KPH di Jayapura, diwakili oleh Endang Setiawan (Seconded) dan Nurcahyoadi (Forest Policy Facilitator) yang secara intensif mengikuti agenda workshop 2 hari itu. MFP juga memfasilitasi Tim IPB yaitu Dr. Bramasto dan M. Yusuf mengikuti workshop.

Kunjungan ini merupakan pendekatan pro aktif untuk mengidentifikasi potensi dukungan dari mitra lokal,

nasional maupun pemda Papua yang berkolaborasi dalam pembangunan KPH di Papua.

Keikutsetaan Tim MFP dimulai 12-13 September, berperan aktif dalam workshop KPH, dimana Endang Setiawan dan Nurcahyoadi terlibat dalam diskusi dalam kelompok gugus tugas.

Tim IPB yang ikut bersama MFP juga terlibat aktif dalam diskusi kelompok workshop itu. Bahkan Dr. Bramasto kemudian diminta untuk memfasilitasi tindak lanjut workshop KPH Papua di Bogor

### Jejak MFP

Ada dua tahap penting keterlibatan MFP dalam pengembangan Rancang Bangun KPH Papua. Pertama keikutsetaan Tim MFP dalam lokakarya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan dan Penyusunan Grand Strategi Kehutanan di Jayapura 11-12 September 2008.

Kedua, dengan memberi dukungan pada Lokakarya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Era Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Pengembangan Komunikasi Multipihak

Dua tahap itu adalah kunci utama mendorong Pembangunan KPH di Papua dewasa ini

- RRB-



## Substansial Perencanaan Pembangunan KPH di Papua

Sebagai bagian dari kegiatan Perencanaan Kehutanan, Pasal 17 UU No. 41/1999 mengamanahkan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, yakni pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan untuk tingkat : provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

### Tujuan

Lokakarya Pembangunan KPH dalam Kerangka Kebijakan Otonomi Khusus Pemerintah Papua ini bertujuan untuk : (a) Memfasilitasi Papua dalam menyusun Grand Strategy Pembangunan Kehutanan dalam era otonomi khusus Papua. (b) Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dalam menyusun Rencana Aksi Pembangunan KPH. (c) Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dalam menyusun Rencana pengelolaan KPH. (d) Melakukan rintisan komunikasi multipihak dan bagian dari penggalian pemetaan multipihak (Stakeholders Mapping).

### Sasaran Hasil

(a) Konsep arahan penyusunan Grand Strategy Pembangunan Kehutanan Papua dalam



era otonomi khusus. (b) Konsep arahan penyusunan Rencana Aksi Pembangunan KPH di Provinsi Papua dan Papua Barat. (c) Konsep arahan penyusunan Rencana pengelolaan KPH. (d) Terkumpulnya sebagian informasi pemetaan multipihak (Stakeholders Mapping).

**Sasaran Obyek** (a) Mengevaluasi kelengkapan data dan informasi (sesuai hasil pertemuan di Jayapura, 11 – 12 September 2008) (b) Membahas Isi Laporan : Rancang Bangun KPH, Action Plan Pembangunan KPH, Rencana Pengelolaan KPH, (c) Penulisan isi laporan. (d) Rumusan tindak lanjut untuk bulan Oktober – Desember 2008

Tim Papua dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi dari beberapa kabupaten, dipimpin oleh Noah, bertandang ke Bogor untuk menindaklanjuti proses pembangunan KPH di Papua. Forci Fahutan IPB Tim yang dipimpin Bramasto, Hariadi K, Ngadiono, Haryanto dkk memandu dan memfasilitasi proses tsb. Selama dua hari workshop yang dihadiri pula oleh LSM

**Gugus Kelompok Kerja**

Dalam workshop ini, metode fasilitasi mengelompokkan peserta dalam 3 kelompok besar yaitu: Kelompok Action Plan, Kelompok Manajemen Plan, Kelompok Grand Strategi.

Kelompok Grand Strategi bertugas menyusun strategi dalam rancang bangun KPH Papua kedepan yang harus didiskusikan dengan stakeholder di Papua. Kelompok Grand Strategi beranggotakan: Noah Kapisa, Hariadi K, Suhendro A. Basofi, Max J. Tokede, Dominikus L. Gaol, Zulfikr Mardiyadi,

Kelompok Action Plan bertugas membentuk arah dan perencanaan kerja yang

melibatkan semua pihak dalam pengembangan KPH di Papua. Kelompok ini terdiri dari : Bramasto, Budi P. Arnold Manting, Totok M.U., Agus B. Wibowo



Kelompok Manajemen Plan berusaha menyusun analisis pembentukan KPH yang terdiri dari pengembangan prinsip, kriteria, indikator dan lembaga verifikasi. Selain itu dua komponen penting lainnya adalah analisis kelembagaan dan rencana pengelolaan KPH. Tim ini terdiri dari Ngadiono (Yay. Adisanggoro) Endang Setiawan (MFP), Yayat (Telapak), Didi (TFT), Buce Saleh, Boni Darmawan, Yusup

**PESERTA LOKAKARYA**

Dishutbun Papua, Dishut Sorong, BPKH XVII, UNIPA, BPKH wilayah X, Dishut Sultra. LSM yang hadir CIFOR, Tropen BOS IP, Telapak, FWI, CI, Fahutan IPB, FORCI- IPB, SAMDANA, Baplan, WWF Indonesia, KEHATI. Narasumber IPB, Hariadi Kartodiharjo, Bramasto , Budi Didi. Dr. dll. Ngadiono (Yay Adi Sanggoro) Dari MFP: Diah Raharjo, Nurcahyoadi, Endang Setiawan dan Rio Bunet. Fasilitator pertemuan ini adalah Hariyanto IPB.

